

buletin Bappebti

Mengabdikan Dengan Integritas

**Detak SRG
di Jantung Ibukota
Jakarta**

**JFX Dapat Izin CFD
Multilateral
Jangan Dilupakan**

**Rakor Penegakan Hukum
Sepakat Memahami PBK**

e-reporting

Tingkatkan Kredibilitas PBK

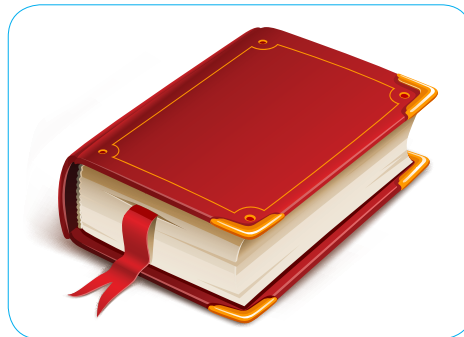


DAFTAR ISI

Berita Utama.....	4-7
- E-Reporting, Tingkatkan Kredibilitas PBK	
Resi Gudang.....	8-10
- Detak SRG di Jantung Ibukota Jakarta	
Berjangka.....	11-13
- Rakor Penegak Hukum, Seia Sekata Memahami PBK	
- JFX Dapat Izin CFD, Multilateral Jangan Dilupakan	
Agenda Foto.....	14-15
Aktualita.....	16-17
- Transaksi PLKA Lombok Pecahkan Rekor	
- Konsumsi Kakao Meningkat Industri Defisit Bahan Baku	
- PT Bukit Asam Pionir Market Maker Kontrak Batubara JFX	
- BI Gagas Pilot Proyek SRG di Sragen	
Analisa.....	18
Breaknews.....	19
Info SRG.....	20-21

Forum...22-23

Subjek Kontrak Berjangka



Kolom...24-25

Part II

Produk Derivatif yang Diperdagangkan di Bursa



Kiprah...26-27

Industri PBK Harus Didukung Sektor Pendidikan



Tips 7P

- 1). Pelajari latar belakang perusahaan yang menawarkan anda bertransaksi;
- 2). Pelajari tata cara bertransaksi dan penyelesaian perselisihan;
- 3). Pelajari kontrak berjangka komoditi yang akan diperdagangkan;
- 4). Pelajari wakil pialang yang telah mendapatkan izin dari Bappebti;
- 5). Pelajari isi dokumen perjanjiannya;
- 6). Pelajari risiko-risiko yang dihadapi.
- 7). Pantang percaya dengan janji-janji keuntungan tinggi.



KEMENTERIAN
PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

MINISTRY OF TRADE



Penerbit

Badan Pengawas Perdagangan
Berjangka Komoditi

Penasihat/Penanggung Jawab
Sutiriono Edi

Pemimpin Redaksi
Junaedi

Wakil Pemimpin Redaksi
Subagyo

Dewan Redaksi
Natalius Nainggolan, Himawan Purwadi,
Widiastuti, Yuli Edi Subagio,
Yovian Andri, Tomi Setiawan,
Harry Prihatmoko, Poppy Juliyanti.

Sirkulasi
Apriliyanto,
Annisa Fitri Wulandari, Katimin.

Alamat Redaksi
Gedung Bappebti
Jl. Kramat Raya
No. 172, Jakarta Pusat.

www.bappebti.go.id

Redaksi menerima artikel ataupun opini
dikirim lengkap dengan identitas serta foto
ke E-mail:
buletin@bappebti.go.id



Foto : Kepala Biro Hukum Bappebti, Sri Haryati menjadi narasumber dalam acara Pelatihan Khusus PBK kepada Wartawan Beritasatu Media Holdings

1 Juli 2014 Bappebti resmi menetapkan laporan keuangan baik berupa harian, bulanan maupun triwulan dari pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi di tanah air, disampaikan melalui pelaporan elektronik atau lazim disebut e-reporting. Kebijakan ini dicetuskan Bappebti dengan diharapkan membawa perubahan besar dalam tata kelola pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi.

Budaya tertib administrasi tak dapat ditawar-tawar lagi untuk meningkatkan integritas industri ini di tengah persaingan ketat dan terbukanya pasar Asean pada tahun 2015, dengan berlangsungnya Asean Economy Community (AEC) atau Masyarakat Ekonomi Asean.

Selain meningkatkan integritas pelaku usaha perdagangan berjangka komoditi di tanah air, laporan keuangan yang disampaikan secara harian dengan e-reporting, juga meningkatkan kredibilitas industri di kacamata internasional. Hal itu diyakini karena laporan keuangan dari para pelaku usaha tersebut mengadopsi standar internasional *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

Bagian lain yang menjadi laporan Redaksi dan tak kalah penting disajikan pada edisi ini, yakni diberikannya izin perdagangan *contract for difference* (CFD) kepada Jakarta Futures Exchange (JFX). Tak tanggung-tanggung, izin yang diperoleh JFX itu menawarkan sebanyak 400 kontrak CFD berbasis mata uang asing, indeks, saham, suku bunga, komoditi dan lainnya.

Terkait itu Kepala Bappebti, Sutiriono Edi,

saat dilakukannya sosialisasi CFD dikalangan anggota JFX, pada 19 Mei 2014 lalu, sejak dini mengingatkan agar pelaku usaha khususnya anggota JFX, tidak lupa dengan misi utama berdirinya bursa berjangka yakni sebagai saran penciptakan harga rujukan dari berbagai komoditi unggulan ekspor Indonesia. Memang beberapa jenis komoditi unggulan ekspor Indonesia sudah ada ditawarkan di bursa berjangka, namun kinerjanya masih belum membanggakan bagi Indonesia sebagai negara produsen sekaligus sebagai pasar internasional.

Karena itu Sutiriono Edi, berpesan, perusahaan pialang berjangka memiliki tanggungjawab besar dalam mengedukasi masyarakat akan produk-produk yang ditawarkan bursa berjangka.

Sementara itu, perkembangan sistem resi gudang (SRG) yang dilaporkan pada edisi ini, yakni munculnya PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) sebagai pioner implementasi SRG di Ibukota Jakarta. Menurut Dirut FSTJ, Dwi Antono, implementasi SRG di Jakarta bukan saja mewujudkan Visi pendiri FSTJ yakni Ali Sadikin, yang juga Gubernur DKI Jakarta di saat itu. FSTJ yang nantinya sebagai Pengelola Gudang SRG, akan menjadi pusat perdagangan pangan terbesar di Asean. Boleh jadi, FSTJ sebagai pengelola Pasar Induk Beras Cipinang, yang setiap harinya sedikitnya memperdagangkan 3.00 ton beras untuk kebutuhan warga DKI Jakarta, menjadi magnitude bagi petani gabah di daerah. Hal itu dikarenakan FSTJ akan siap menampung berapa pun besarnya produksi beras petani dari luar daerah. Mari kita tunggu aksi FSTJ sebagai Pengelola Gudang SRG.

Salam!



***Salah satu tolak
ukur sebuah industri
yang memiliki
kredibilitas tinggi
ditunjukkan dengan
tertib administrasi
sesuai ketentuan
yang berlaku secara
internasional.***

Badan pengawas perdagangan berjangka komoditi (Bappebti) dalam meningkatkan kredibilitas pelaku industri perdagangan berjangka komoditi di tanah air, sejak tahun 2003 telah menetapkan berbagai kebijakan bentuk laporan yang harus disampaikan sebagai bahan penilaian dalam mengukur kinerja industri.

Bentuk laporan para pelaku usaha itu tertuang pada Keputusan Kepala Bappebti No. 46/BAPPEBTI/KP/IX/2003, tentang Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka, yang kemudian kebijakan itu disempurnakan menjadi Peraturan Kepala Bappebti No. 100/BAPPEBTI/PER/12/2012, tentang Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka. Kebijakan itu terbit dengan menyesuaikan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia dan sudah mengadopsi *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

Dalam kaitan Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka, Bappebti juga mengatur laporan keuangan dan

ketentuan modal perusahaan pialang berjangka. Ketentuan itu tertuang pada SK Kepala Bappebti No. 47/Bappebti/KP/IX/2003, yang kemudian berubah menjadi Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 106/Bappebti/KP/X/2013, tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan bagi Pialang Berjangka.

Kepala Bappebti, Sutriyono Edi dalam paparannya ketika membuka pelatihan teknis pelaku usaha tentang pelaporan keuangan pialang berjangka pada 13-14 Maret lalu, mengatakan, integritas pelaku usaha perdagangan berjangka tidak saja ditunjukkan dengan tingginya likuiditas volume transaksi. "Melainkan integritas itu tercemrin dari tertibnya penyampaian laporan kepada otoritas, baik berupa laporan kegiatan maupun laporan arus keuangan."

"Industri perdagangan berjangka komoditi di Indonesia sudah diperhitungkan oleh bangsa lain. Sebab itu industri ini harus memiliki integritas



tinggi yang diperlihatkan dengan tertib administrasi dan transparansi,” jelas Sutriyono.

Tertibnya pelaporan dari pelaku perdagangan berjangka bukan semata-mata kepentingan otoritas, tambah Sutriyono Edi. “Kepentingan Bappebti dengan mengeluarkan berbagai kebijakan tertib adminstasi itu, hanya ‘lah untuk tujuan menciptakan sebuah budaya industri. Sedangkan dari sisi pelaku usaha, dengan memenuhi kebijakan itu menunjukkan kemapanan dan integritasnya sebagai lembaga investasi.”

“Tanpa bermaksud menakut-nakuti, pada tahun 2015 nanti, Indonesia sudah memasuki era Asean Economy Community (AEC)- Masyarakat Ekonomi Asean. Itu artinya, dari sektor perdagangan sektor jasa yang mencakup perdagangan berjangka komoditi akan semakin terbuka dan berkompetisi dengan negara-negara Asean lainnya,” katanya.

“Di satu sisi, AEC merupakan peluang bagi pelaku usaha perdagangan berjangka di tanah air, sebab itu integritas keuangan- misalnya perusahaan pialang berjangka menjadi tolak ukur di dalam menciptakan kepercayaan nasabah atau masyarakat,” jabar Sutriyono.

E-Reporting

Pelaporan keuangan pelaku usaha perdagangan berjangka sudah mengadopsi Standar Akuntansi Keuangan yang disusun oleh Ikatan Akuntansi Indonesia. Hal itu tampak dari kebijakan Bappebti yang diterbitkan dengan Peraturan Kepala Bappebti No. 100/Bappebti/PER/12/2012, tentang Pedoman Akuntansi Pialang Berjangka. Terbitnya Peraturan Kepala Bappebti itu, juga diikuti dengan keluarnya

Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 106/Bappebti/KP/X/2013, tentang Kewajiban Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan bagi Pialang Berjangka.



Sosialisasi e-reporting pialang Berjangka, 13-14 Maret 2014

Inti dari kebijakan Bappebti No. 106 itu, setiap perusahaan pialang berjangka diwajibkan menyampaikan laporan keuangan secara elektronik di laman yang telah disediakan otoritas. Laporan keuangan yang disampaikan melalui elektornik itu mencakup laporan keuangan harian, bulanan dan triwulan. Sedangkan laporan keuangan tahunan disampaikan secara tertulis paling lambat 90 hari setelah berakhirnya tahun laporan.

Mengacu pada kebijakan itu, sejatinya laporan keuangan perusahaan pialang berjangka sudah berlangsung per 1 April 2014. Namun melihat tingkat kesiapan dari para pelaku usaha, Bappebti memberi kesempatan untuk melakukan adaptasi kebijakan tersebut. Sehingga penyampaian laporan keuangan secara elektronik itu efektif berlaku pada 2 Juli 2014.

“Dari sisi sistem yang akan digunakan untuk pelaporan elektronik itu, sudah siap per 1 April lalu. Tetapi karena belum semua pelaku usaha siap, maka masih diberi waktu untuk beradaptasi. Karena kami berharap semua pelaku usaha bisa serempak menyampaikan laporan keuangannya,” jelas Kepala Biro Perniagaan Bappebti, Sri Nastiti Budianti, diakhir Mei lalu.

Karena itu, tambah Nastiti, penyampaian laporan keuangan secara elektronik akan efektif berlaku pada 2 Juli 2014.

IFRS

Penyampaian laporan keuangan secara periodik dari kalangan pelaku usaha pialang berjangka, bagi Bappebti merupakan sarana untuk meningkatkan pengawasan dalam mengetahui persyaratan keuangan minimum.

“Laporan keuangan yang disampaikan secara harian dengan elektronik itu, adalah sarana *early warning system* di Bappebti dalam melakukan pengawasan di tengah kompleksitas perkembangan industri saat ini,” jelas Sri Nastiti.

Sebab itu juga dalam beberapa waktu lalu, tambah Sri Nastiti, kebijakan Kepala Bappebti No. 106 meningkatkan kewajiban keuangan minimum pialang berjangka khususnya Modal Bersih Disesuaikan (MBD). Sebelumnya kewajiban MBD itu nilainya sama baik untuk pialang berjangka yang bertransaksi multilateral maupun bilateral yaitu dengan nilai absolut sebesar Rp 500 juta.

“Jadi saat ini, MBD bagi perusahaan pialang berjangka yang bertransaksi multilateral ditetapkan sebesar Rp 750 juta, sedangkan peserta bilateral sebesar Rp 7,5 miliar. Dan posisi minimum MBD itu harus dilaporkan setiap hari secara elektronik,” kata Nastiti.

Penyusunan laporan keuangan pelaku usaha perdagangan berjangka di tanah air itu, menurut Sri Nastiti Budianti, sudah disesuaikan dengan Standar Akuntansi



Kuangan yang disusun IAI berdasarkan standar internasional- *International Financial Reporting Standards* (IFRS).

"Mengadopsi laporan keuangan dengan standar IFRS, pelaku usaha perdagangan berjangka di tanah air nantinya pun akan mendapat manfaat dari masyarakat internasional. Karena standar laporan keuangan itu berlaku secara internasional," ujar Sir Nastiti.

Sanksi


ayaknya sebuah kebijakan, jika ada pihak yang melanggar tentu akan dikenakan sanksi tegas. Sanksi yang dimaksud yakni pelanggaran Surat Keputusan Kepala Bappebti No. 106/Bappebti/KP/X/2013, tentang Kewajiban

Pelaporan Keuangan dan Ketentuan Modal Bersih Disesuaikan bagi Pialang Berjangka, akan dikenakan denda sebesar Rp 100.000 per hari. Ketentuan itu mengacu Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1999, tentang penyelenggaraan perdagangan berjangka komoditi.

Salah satu bentuk ketaatan penyampaian laporan keuangan harian secara elektronik menurut SK Kepala Bappebti No. 106, yakni laporan harus sudah disampaikan pukul 14.00 WIB pada hari berikutnya. Itu artinya, posisi minimum MBD dan Dana Nasabah pada Rekening Terpisah (DNRT) di hari sebelumnya harus dilaporkan paling lama pukul 14.00 WIB di hari berikutnya.

Menurut Kepala Biro Hukum Bappebti,

Sri Haryati, besarnya nilai denda atas keterlambatan penyampaian laporan itu mungkin kecil bagi perusahaan pialang berjangka. "Tetapi harap dipahami, dengan tidak menyampaikan laporan tepat waktu, di Bappebti tetap memiliki catatan yang kemudian menjadi penilaian khusus bagi perusahaan yang melanggar."

"Saya pikir tidak ada alasan untuk tidak menyampaikan laporan tepat pada waktunya. Karena sosialisasi kebijakan ini sudah disampaikan dalam setiap pertemuan dengan pelaku usaha. Dan Bappebti pun sudah memberi kelonggaran waktu yang semula pada bulan April lalu menjadi 1 Juli 2014," ujar Sri Haryati. 

REKAPITULASI PEMENUHAN PERSYARATAN PERMODALAN PIALANG BERJANGKA PESERTA SPA

PERIODE	MD & EKUITAS SESUAI KETENTUAN	MD BELUM SESUAI KETENTUAN	EKUITAS BELUM SESUAI KETENTUAN	MD & EKUITAS TIDAK SESUAI KETENTUAN	Jumlah
Per 30 Maret 2012	43	6	3	4	56
Per 31 Des 2012	49	2	4	3	58
Per 30 Maret 2013	58	-	2	-	60
Per 30 Jan 2014	58	-	2	-	60

REKAPITULASI NILAI MODAL BERSIH DISESUAIKAN TRIWULANAN TAHUN 2013

TRIWULAN	MBD SESUAI KETENTUAN	MBD PERINGATAN DINI	MBD DIBAWAH KETENTUAN	TIDAK MENYAMPAIKAN	Jumlah
Triwulan I	57	-	3	4	61
Triwulan II	58	3	1	3	62
Triwulan III	58	2	4	-	64
Triwulan IV	Dlm proses review	Dlm proses review	Dlm proses review	Dlm proses review	Dlm proses review



REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN BULANAN PEDAGANG PENYELENGGARA SPA 2013

BULAN	MENYAMPAIKAN	TIDAK MENYAMPAIKAN	JUMLAH
Januari	15	-	15
Februari	15	-	15
Maret	15	-	15
April	14	1	15
Mei	15	1	15
Juni	15	-	15
Juli	13	2	15
Agustus	15	-	15
September	15	-	15
Oktober	15	-	15
November	15	-	15
Desember	14	1	15

REKAPITULASI PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN BURSA BERJANGKA & LEMBAGA KLIRING BERJANGKA

TAHUN	TEPAT WAKTU (Audited)	TERLAMBAT (Audited)	TIDAK MENYAMPAIKAN	JUMLAH
2010 BB	2	-	-	2
2010 LKB	2	-	-	2
2011 BB	-	2	-	2
2011 LKB	1	1	-	2
2012 BB	2	-	-	2
2012 LKB	2	-	-	2
2013 (per 17 Feb)	-	-	-	-



Detak SRG di Jantung Ibukota Jakarta

Lazimnya Gudang Sistem Resi Gudang (SRG) terletak di sentra produksi untuk memudahkan akses distribusi hasil produksi para petani. Tetapi terobosan baru digagas PT Food Station Tjipinang Jaya yang berorientasi SRG di pusat pasar sentra konsumsi. Bagaimana caranya?

PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) resmi menandatangani status Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov DKI Jakarta, pada 3 Desember 2013, mulai bergegas menyusun strategi dan berkompetisi dengan pelaku usaha lainnya. Salah satu strategi FSTJ dalam meningkatkan perannya di bisnis komoditi beras di Ibukota Jakarta, belum lama ini mengajukan diri kepada Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai Pengelola Gudang SRG. Gudang yang dimaksud terletak di Pusat Ibukota Jakarta, tepatnya di Pasar Induk Beras Cipinang (PIBC), Jakarta Timur.

Dirut PT FSTJ, Dwi Antono, yang ditemui Buletin Bappebti pada Mei 2014 lalu, di ruang kerjanya di Pasar

Induk Beras Cipinang, mengatakan, pendekatan implementasi SRG selama ini selalu berbasis produksi. Meski demikian, PT FSTJ mencoba membuat terobosan baru dengan mengimplementasikan SRG berbasis pasar. "Dengan gagasan ini saya mengajak berpikir terbalik. Selama ini orang berpikir bagaimana menanam, panen, dan di bawa ke pasar untuk di jual. Tapi, saya berpikir justru sebaliknya. Di pasar dapat dilihat berapa kebutuhan barangnya, siapa pelakunya, serta dari mana asal barangnya, hingga bagaimana mekanisme pasar bisa berjalan dan memberi keuntungan untuk semua pihak."

Menurut Dwi, ketertarikan PT FSTJ untuk mengimplementasikan SRG di PIBC, tidak terlepas dari misi perusahaan untuk



menjadi stabilisator harga dan ketahanan pangan pokok khususnya beras di DKI Jakarta. Dengan misi itu, Dwi menyadari, DKI Jakarta tidak memiliki lahan pertanian untuk mensuplai kebutuhan beras masyarakatnya. "Padahal kalau dihitung, kebutuhan beras di DKI Jakarta bisa mencapai sekitar 3.000 ton dalam sehari atau setara 6.000 ton gabah. Dengan hitungan itu, maka diperlukan berhektar-hektar sawah padi yang harus panen setiap harinya."

"Karena itu, solusi tepat untuk menjaga ketahanan pangan di DKI Jakarta yaitu dengan implementasi SRG. Maka kami bertekad menjadi Pengelola Gudang SRG," bilang Dwi.

Saat ini, pihaknya masih menunggu izin sebagai Pengelola Gudang dari

Bappebti. Adapun untuk SDM pengelola gudangnya, jelas Dwi, pihaknya sudah menyiapkan SDM yang handal sebagai Pengelola Gudang SRG. "Pada dasarnya, kami lahir sebagai BUMD dan lahir sebagai Pengelola Gudang," tegasnya.

Sedangkan untuk gudangnya juga sudah mendapat sertifikasi dari Bappebti sebagai gudang SRG untuk komoditas beras. Gudang ini merupakan milik PT FSTJ dengan luas 5.000 m² dan kapasitas kurang lebih 15.000 ton beras. "Implementasinya diperkirakan pada bulan Juni mendatang, kalau bisa sebelum bulan puasa Ramadhan," ujar Dwi.

Dalam mekanisme pelaksanaannya, prinsipnya gudang SRG yang dikelola PT FSTJ membantu kesulitan para pedagang beras skala kecil. Memang sedikit berbeda dengan gudang SRG yang sudah berjalan lebih dahulu. Tapi, perlu diingat, meski beras itu berada di tangan pedagang, beras itu sebenarnya juga milik petani-petani di daerah.

Acapkali pedagang beras dari daerah yang berjualan di Pasar Induk Beras Cipinang harus mengeluh karena berasnya tidak habis terjual. Karenanya, para pedagang harus memilih di antara dua pilihan, apakah dijual murah atau dibawa kembali pulang ke daerah. "Kalau dibawa pulang, pasti akan terkena biaya lagi, dan kalau dijual murah pastinya bikin mereka rugi," terangnya.

Untuk itu, jika gudang SRG di Pasar Induk Beras Cipinang sudah berjalan, maka pedagang dapat memanfaatkan gudang SRG tersebut. Nantinya, unit PT FSTJ juga disiapkan untuk menjadi standby buyer (pembeli siaga), sehingga bisa membantu kesulitan para pedagang. "Kami akan membeli beras dari pedagang dengan harga yang wajar, lalu menyimpannya di gudang SRG. Tapi, pedagang atau petani di daerah juga dapat menyimpan langsung ke gudang SRG di Pasar Induk Beras Cipinang," katanya.

Ekspansi ke Daerah

Dari kacamata Dwi Antono, mantan Dirut PT Pertani, ini, jika dibandingkan dengan petani, maka pedagang memiliki potensi yang lebih besar untuk memanfaatkan gudang SRG. "Pedagang itu pelaku bisnis, mereka akan lebih cepat memahami skema SRG. Sedangkan untuk menuntun petani harus memakan waktu yang lama dan mereka selalu ingin duit instan. Jadi sosialisasi SRG akan kami lakukan bukan kepada petani, tapi kepada pelaku bisnis."

Karena itu, Dwi optimis gudang SRG di Pasar Induk Beras Cipinang akan dapat berjalan dengan baik. Ke depannya, Dwi berharap, PT FSTJ tidak hanya terbatas mengelola satu gudang SRG saja. PT FSTJ juga bertekad ekspansi ke daerah menjadi pengelola gudang-gudang SRG di berbagai daerah sentra produksi, seperti halnya PT Pertani.

"Pedagang-pedagang beras di Cipinang itu banyak yang dari daerah. Nantinya mereka bisa kami ajak kerjasama untuk memanfaatkan gudang-gudang SRG di daerah," ungkapnya.

Selain itu, PT FSTJ juga akan langsung merangkul dan bermitra dengan petani di daerah untuk ikut memanfaatkan gudang SRG. Dengan demikian, tiga permasalahan petani akan dapat teratasi. "Petani memiliki tiga permasalahan, antara lain, modal yang kurang, pasar terhambat, dan sarana tidak tersedia," katanya.

Kalau kendala itu sudah teratasi, maka produksi dan produktivitas pangan akan meningkat. Dan itu menjadi suatu sinyal produksi pangan nasional akan menjadi baik.

Di sisi lain, kata Dwi, Pemda DKI Jakarta bersama dinas terkait juga ikut antusias dengan adanya gudang SRG di Pasar Induk Beras Cipinang. "Perihal gudang SRG sudah saya sampaikan di rapat dengan Sekda (Sekretaris Daerah) DKI Jakarta, selain itu juga dengan Dinas Koperasi dan Dinas Pertanian. Mereka semuanya mendukung."



Dirut PT FSTJ, Dwi Antono

Kawasan dan Outlet

Pembangunan kawasan pangan binaan juga menjadi salah satu strategi untuk memenuhi konsumsi beras masyarakat Jakarta. Dwi menjelaskan, nantinya Pemprov DKI Jakarta akan membuka dan menata kawasan pertanian di beberapa daerah sebagai basis produksi beras. "Rencananya, kami membidik di daerah Jawa dan Sulawesi," tuturnya.

Selain itu, PT FSTJ juga berencana memperluas jangkauan penjualan beras hingga di setiap kelurahan di pelosok Ibukota dengan membangun gerai-gerai seperti minimarket. "Kami akan membuat outlet-outlet seperti model Alfamart di setiap kelurahan, jumlahnya bisa mencapai sekitar 300 outlet. Bisa saja nanti kami beri nama 'Pemdsmart,'" terangnya.

Nantinya, outlet-outlet itu lebih fokus ke beras sebagai komoditas dagangnya. Tapi, kata Dwi, tidak menutup kemungkinan adanya komoditas lain yang diperdagangkan. "Seperti daging, sayur-sayuran, sedangkan komoditas lainnya seperti makanan instan, produk

susu, minuman dan sabun pasti akan datang sendiri dipasok para distributor."

"Langkah inilah yang bisa meningkatkan usaha PT FSJT dalam perannya mengendalikan harga di pasar khususnya di Ibukota Jakarta," tambahnya.

Harapan Dwi, program kawasan pangan, outlet dan SRG dapat bersinergi dan menjadi strategi jitu untuk memenuhi kebutuhan pangan di DKI Jakarta. "Kawasan pangan akan mem-back up stok beras gudang SRG Pasar Induk Beras Cipinang, dan gudang SRG itu mem-back up stok beras di outlet-outlet."

Konsep itu, dapat juga diterapkan untuk komoditas lainnya, seperti daging sapi. Dwi melihat, SRG untuk komoditas daging bisa berjalan dan menjadi solusi mengatasi kelangkaan daging di DKI Jakarta.

Dwi optimis, jika semua program itu khususnya SRG dapat berjalan dengan baik, maka tidak hanya kebutuhan pangan di DKI Jakarta saja yang tercukupi, tapi juga di Indonesia. "Langkah ini akan menyebar di seluruh daerah di Indonesia. Dan perlu diingat, Indonesia memiliki penduduk, sawah, dan produksi beras

terbesar. Mestinya kita bisa swasembada beras dan menjadi leader (pemimpin) perdagangan pangan di Kawasan Asean," tegasnya.

Hal itu, menurut Dwi, merupakan cita-cita para pendiri PT FSJT, saat perusahaan ini didirikan pada tahun 1972 silam. "Salah satu pendirinya yaitu Bang Ali (Gubernur DKI Jakarta, Ali Sadikin). Dan secara historis, saya menangkap pesannya, bahwa Jakarta harus menjadi pusat informasi dan perdagangan pangan terbesar di Asia Tenggara. Itu visi-nya Bang Ali."

Maka itu, Pasar Induk Beras Cipinang dibangun Bang Ali dekat dengan Stasiun Kereta Api Jatinegara. Maksudnya apa? Agar jalur distribusi barang atau komoditi dari daerah sentra produksi lebih cepat dan murah ke Pasar Induk Beras Cipinang.

"Jadi, dengan implementasi SRG dengan ditunjuknya PT FSTJ sebagai Pengelola Gudang di Pasar Induk Beras Cipinang, merupakan sarana mewujudkan Visi-Misi Bang Ali menjadikan Ibukota Jakarta sebagai pusat perdagangan pangan terbesar di Asia Tenggara," tandas Dwi Ananto. 📍

Orang lain makan nangka, awak kena getahnya. Ungkapan itu mungkin cocok jika melihat aksi para pialang ilegal yang merugikan masyarakat, sehingga citra positif industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) di Indonesia ikut tercoreng.



Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti) sebagai regulator industri PBK terus meningkatkan dalam mengawasi pialang-pialang ilegal secara komprehensif. Selain itu, Bappebti juga mengupayakan pencegahan terhadap aksi pialang-pialang ilegal secara preventif. Salah satunya contohnya, yakni menyelenggarakan Rapat Koordinasi (Rakor) Penegakan Hukum di Bidang Perdagangan Berjangka Komoditi dengan Aparat Penegak Hukum di Wilayah Provinsi Riau, di Hotel The Premiere, Pekanbaru, 6-7 Mei 2014 lalu. Rakor kali ini merupakan Rakor kedua di tahun 2014, setelah yang pertama diselenggarakan di Pontianak.

Rakor tersebut dibuka oleh Kepala Disperindag Riau, Ramli Walid, dan dihadiri oleh Kepala Biro Hukum Bappebti, Sri Haryati serta jajarannya.

Menurut Sri Haryati, Rakor tersebut bertujuan menyamakan persepsi dan langkah serta pemahaman UU No. 32 Tahun 1997 tentang PBK yang telah mengalami perubahan menjadi UU No. 10 Tahun 2011.

"Penyelenggaraan Rakor ini juga bertujuan untuk meningkatkan kerjasama dalam rangka penegakan hukum diantara aparat penegak hukum di wilayah hukum Provinsi Riau dalam penanganan kasus-kasus di bidang PBK," kata Sri Haryati

kepada buletin Bappbeti, usai acara Rapat Koordinasi.

Sri mengatakan, ada beberapa hal yang dihasilkan dalam Rakor ini, antara lain, Pertama, sosialisasi mengenai PBK perlu diperbanyak. Hal ini penting untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman di bidang PBK kepada semua pihak terutama masyarakat, sehingga masyarakat tidak mudah diiming-imingi dengan banyaknya keuntungan yang dijanjikan.

Kedua, perlu diadakan workshop diantara aparat penegak hukum dalam rangka langkah preventif penanganan pelanggaran di bidang PBK.

Ketiga, perlu adanya himbuan bagi Pialang Berjangka untuk memenuhi UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Sebab, salah satu pasal yang termaktub dalam UU tersebut, mengatur setiap perusahaan yang berkedudukan dan menjalankan usahanya di wilayah Negara Republik Indonesia harus mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

"Termasuk di dalamnya kantor cabang, kantor pembantu, anak perusahaan serta agen dan perwakilan dari perusahaan itu yang mempunyai wewenang untuk mengadakan perjanjian wajib didaftar dalam Daftar Perusahaan," papar Sri Haryati.

Pialang Ilegal Riau

Kepala Disperindag, Ramli Walid, mengatakan, saat ini baru ada sembilan perusahaan pialang yang resmi berdiri dan berkantor di Pekanbaru, Riau. "Di luar sembilan perusahaan ini, dipastikan ilegal karena tidak memiliki izin dan kantor yang dapat diketahui keberadaannya," kata Ramli di sela-sela acara Rakor.

Ramli mengungkapkan, beberapa waktu belakangan ini, banyak muncul pialang yang menjanjikan keuntungan yang besar bagi masyarakat dengan berbagai modus operandi, salah satunya investasi emas. "Akibat ulah pialang ilegal ini, banyak masyarakat tertipu. Untuk itu kita minta warga hati-hati dan ikuti aturan pemerintah," katanya.

Saat ini, beber Ramli, ada dua perusahaan pialang yang beroperasi di Provinsi Riau yang diduga kuat ilegal dan tidak diketahui keberadaan kantornya. "Dua perusahaan itu yakni PT Wong Financial Pekanbaru dan PT Rapid Gold & Currency Exchange," ungkapnya.

Sementara itu, Ramli mengatakan ada sembilan perusahaan pialang legal yang kini membuka kantor cabangnya di Provinsi Riau. Diantaranya, PT Best Profit Futures, PT Midtou Aryacom Futures, PT Millenimum Penata Futures, PT Monex Investindo Futures, PT Platon Niaga, PT Rifan Financindo Berjangka, PT Gatra Mega Berjangka, PT Central Capital Futures, dan PT Interpan Futures.



JFX Dapat Izin CFD Multilateral Jangan Dilupakan

Bappebti memberikan izin kepada JFX untuk memperdagangkan 400 kontrak produk CFD.

Tebaran senyum sumringah menyembul dari wajah para pelaku usaha di di Jakarta Futures Exchange (JFX) tatkala menyambut terbitnya izin produk contract for difference (CFD) yang resmi diluncurkan pada 19 Mei 2014 lalu.

"Terbitnya izin CFD sangat kami tunggu sejak lama karena kami telah mengajukan izin CFD ke Bappebti (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) sejak tahun lalu. Diharapkan produk ini menjadi suplemen yang merangsang pelaku pasar di industri perdagangan berjangka komoditi (PBK)," kata Direktur JFX, Bihar Sakti Wibowo kepada buletin Bappebti, Mei 2014 lalu.

Dengan demikian, kini JFX

resmi mendapatkan izin untuk memperdagangkan 400 kontrak produk CFD dalam skema sistem perdagangan alternatif (SPA) atau kalangan pelaku usaha lebih dikenal dengan transaksi bilateral.

Bihar berharap dengan hadirnya kontrak CFD ini, maka transaksi SPA dapat kembali meningkat perdagangannya di JFX. Pasalnya, kata Bihar, transaksi SPA di JFX terus mengalami penurunan dalam beberapa tahun terakhir. Hal itu, kata Bihar, memberikan pengaruh negatif terhadap posisi keuangan dari perusahaan.

Pada tahun 2013, pendapatan JFX mengalami penurunan sekitar Rp 14 miliar. Meski demikian, jelas Bihar, dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan (RKAT) 2014, JFX tetap mencoba beraktifitas secara normal meski kondisi keuangan minus. "Beberapa faktor penyebab turunnya transaksi SPA di JFX, antara lain karena kondisi market yang memang kurang mendukung dan juga persaingan usaha," terangnya.

Jika merujuk data JFX, total volume transaksi di JFX sampai dengan April 2014 tercatat sebesar 1.074.652 lot atau

turun 45,15 % dari 1.959.109 lot periode yang sama tahun lalu. Dari total transaksi tersebut, transaksi SPA tercatat 967.976 lot atau turun 47,74 % dari periode yang sama tahun lalu yang tercatat sebesar 1.852.216 lot. Sementara transaksi multilateral per April 2014 sebesar 106.676 lot atau kurang lebih sama dibandingkan tahun lalu yang sebesar 106.893 lot.

Sementara itu, Direktur Utama JFX Sherman Rana Krishna mengatakan, produk CFD memberikan alternatif strategi trading jangka pendek hingga menengah yang memberikan berbagai manfaat dari transaksi sekuritas tanpa harus memilikinya secara fisik.

"CFD saat ini merupakan suatu produk kontrak yang populer di luar negeri karena ditransaksikan dengan menggunakan margin dan bebas pajak. Dengan CFD, investor dapat membuka posisi long maupun posisi short atas instrument apapun tanpa harus membayar nilai penuh atas instrument tersebut," tutur Sherman.

Kualitas

Lamanya pemberian izin CFD yang diajukan JFX tentunya bukan tanpa sebab. Bappebti tidak dapat langsung memberikan izin pada tahun lalu karena masih banyak permasalahan yang menggantung di kalangan pelaku usaha di industri PBK.

Menurut Kepala Bappebti, Sutriono Edi, sengketa sejumlah perusahaan pialang berjangka dengan para nasabahnya yang hingga saat ini belum menemui titik penyelesaian. Akibatnya, otoritas pengawas perdagangan berjangka dalam hal ini Bappebti ikut terseret.

"Saat ini ada sejumlah perusahaan pialang berjangka diduga sebagai sarana money laundering (pencucian uang). Karena permasalahan itu, Bappebti pun ikut dilibatkan sebagai lembaga pengawas perdagangan berjangka," ungkapnya.

Sutriono mengatakan, banyaknya pengaduan masyarakat akan investasi ilegal kepada sejumlah lembaga negara, membuat Bappebti pun tidak luput disurati dan dimintai keterangan. Antara lain, dari Ombudsman, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Sebab itu, Sutriono berpesan, produk CFD yang diluncurkan JFX tidak hanya diarahkan kepada nasabah ritel. Melainkan juga kepada lembaga keuangan, seperti perbankan atau manajer keuangan. "Perusahaan pialang jangan hanya mementingkan kuantitas, tetapi juga kualitas transaksi. Karena dengan tingginya kualitas transaksi, integritas industri ini akan meningkat sebagai sarana investasi yang aman dan nyaman," katanya.

Meski demikian, kata Sutriono, Bappebti tidak membatasi perusahaan pialang untuk membidik nasabah ritel, asal prinsip *know your customer* (KYC) harus benar-benar dijalankan. "Jangan sampai uang belanja ibu-ibu rumah tangga digunakan untuk transaksi CFD," papar Sutriono Edi.



Kepala Bappebti Sutriono Edi menyampaikan arahan

Multilateral

Perusahaan pialang berjangka sebagai bagian terdapat dari industri perdagangan berjangka memiliki tanggungjawab besar untuk mengedukasi masyarakat terhadap manfaat bursa berjangka dan produk-produk yang ditawarkan. Dalam kaitan itu, Kepala Bappebti Sutriono Edi, berpesan, perusahaan pialang setidaknya memiliki tiga tanggungjawab besar dalam kemajuan industri perdagangan berjangka. "Tanggungjawab pertama, perusahaan pialang harus melakukan edukasi kepada masyarakat. Kedua, perusahaan pialang harus melakukan pengawasan terhadap tim pemasaran yang menawarkan produk-produk SPA."

"Dua tanggungjawab perusahaan pialang itu tidak terpisahkan satu sama lain. Tim pemasaran memiliki kewajiban memperkenalkan produk bursa, sedangkan perusahaan pialang harus bertanggungjawab atas sepak terjang tim marketing," jelas Sutriono.

Lebih jauh dikatakan Sutriono Edi, tanggungjawab ketiga dari perusahaan pialang adalah, ikut bertanggungjawab melakukan pengkajian akan produk-

produk yang diminati masyarakat. "Produk CFD yang ditawarkan JFX jumlahnya mencapai 400 kontrak. Lalu pertanyaannya, apakah semua kontrak itu likuid? Kalau tidak laku, kita harus dikeluarkan dari bursa berjangka. Tetapi jika diminati investor, kita harus kembangkan," tegasnya.

Pesan penting lainnya yang perlu menjadi catatan oleh setiap pelaku usaha yakni tidak boleh melupakan kontrak multilateral meski produk CFD telah diluncurkan. "Sebab tujuan didirikan bursa berjangka bukan untuk memperdagangkan kontrak-kontrak SPA. Melainkan bursa berjangka harus berfungsi sebagai lindung nilai (hedging) dan sebagai sarana pembentukan harga (price discovery)," katanya.

Harus diakui, selama ini total volume kontrak multilateral masih tergerus dengan total volume kontrak SPA. "Transaksi kontrak multilateral belum menunjukkan kenaikan yang cukup berarti dan masih jauh dari yang diharapkan. Pencapaian tersebut belum sesuai dengan Amanat UU No. 10 Tahun 2011 tentang Perdagangan Berjangka Komoditi," pungkas Sutriono Edi.



Agenda Foto



Pelatihan Teknis Pelaku Usaha SRG Bali



Kepala Bappebti, Sutriyono Edi didampingi Kepala Biro Pasar Fisik dan Jasa, Pantas Lumban Batu membuka sekaligus memberikan pengarahan dalam acara Pelatihan Teknis Pelaku Usaha Sistem Resi Gudang (SRG) untuk membentuk calon pengelola gudang SRG yang diselenggarakan di Bali, 7-9 Mei 2014.

Dalam pengarahannya Kepala Bappebti mengatakan dalam pelaksanaan SRG, pengelola gudang memiliki peranan sangat penting. Pengelola gudang merupakan pihak yang menjaga dan mengelola komoditi yang dititipkan oleh pemilik barang, atau komoditi yang menjadi agunan dalam penjaminan Resi Gudang. Melalui peran pengelola

gudang-lah mutu dan volume komoditi akan tetap terpelihara sehingga tidak berubah, sebagaimana tertera dalam Resi Gudang.

Pelatihan Teknis Pelaku Usaha SRG ini, diikuti 68 peserta calon pengelola gudang SRG yang terdiri dari Tenaga Manager/Penanggujawab Gudang, Operator IT SRG, dan Staf Gudang SRG yang berasal dari PT, Koperasi, BUMN dan BUMD dari 17 kabupaten yang mendapatkan pembangunan Gudang SRG DAK Tahun 2013 dan dari 8 pelaku usaha pergudangan.

Dalam kesempatan tersebut juga dilakukan kunjungan ke gudang PT Pertani dan PT Bayu Jaya Kusuma di Badung dan Tabanan Bali.

Mahasiswa IPB Kunjungi Kementerian Perdagangan, JFX dan BKDI

Sekretaris Bappebti, Junaedi membuka acara kunjungan mahasiswa Institut Pertanian Bogor (IPB) di Kantor Pusat Kementerian Perdagangan, Jakarta, 9 Mei 2014.

Kunjungan ini dilakukan dalam rangka memberikan edukasi tentang Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK), khususnya transaksi multilateral untuk komoditi unggulan Indonesia.

Narasumber yang hadir, yaitu M. Yusuf Affandi dari Bappebti, I Gde Raka Tantra dari Asosiasi Pialang Berjangka Indonesia (APBI), Isa Abiyasa Djohari dari Jakarta Futures Exchange (JFX) dan Ali Jaya dari Bursa Komoditi dan Derivatif Indonesia (BKDI) yang memaparkan materi kepada 17 orang perwakilan dari IPB.

Selain mendapatkan edukasi mengenai industri PBK, para mahasiswa juga melakukan kunjungan ke dua bursa berjangka, yaitu JFX dan BKDI. Mahasiswa diberikan kesempatan untuk melakukan simulasi dalam perdagangan multilateral menggunakan platform perdagangan yang dimiliki oleh kedua bursa tersebut.





Konferensi Kakao Internasional Indonesia Keenam

Mendagri M. Lutfi membuka Konferensi Kakao Internasional Indonesia Keenam, di Nusa Dua, Bali, 16 Mei 2014. Pada pertemuan tersebut, Mendagri memaparkan kebijakan pemerintah dibidang perdagangan kakao dan hilirisasi industri kakao.

Saat ini, Indonesia menempati urutan ketiga sebagai produsen kakao di dunia setelah Pantai Gading dan Ghana. Dengan berkembang industri hilir kakao di dalam negeri dalam dua tahun terakhir konsumsi produk olahan kakao meningkat pesat menjadi 400 gram per kapita.

Dikesempatan yang sama, Kepala Bappebti Sutriyono Edi, melakukan dialog dengan sejumlah pelaku industri kakao dari manca negara untuk menggerakkan pasar jangka kakao di Indonesia.



DPRD Provinsi Kepulauan Babel Kunjungi Bappebti



Kepala Bappebti, Sutriyono Edi menerima kunjungan Panitia Kerja DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) Tentang Tata Niaga Timah ke Kantor Bappebti, di Jakarta, 14 Mei 2014.

Kedatangan rombongan DPRD Provinsi Kepulauan Babel yang dipimpin oleh Ketua Panitia Kerja, Eka Mulya Putra ini, dilakukan dalam rangka melaksanakan koordinasi terhadap perdagangan timah di Babel dengan Bappebti.

Adapun salah satu isu yang dibahas, yakni mengenai implementasi Permendagri Nomor 32 Tahun 2013 Tentang Ketentuan Ekspor Timah. Selain itu, para anggota panitia kerja juga menyampaikan masukan terkait dengan tata niaga timah di Babel.

Dalam kunjungan tersebut, turut hadir Kepala Bidang Ekspor-Impor Disperindag Provinsi Kepulauan Babel, perwakilan dari Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan Kemendagri.

Transaksi PLKA Lombok Pecahkan Rekor

Pertama dalam sejarah pelaksanaan pasar lelang komoditi agro (PLKA) yang diselenggarakan Dinas Perindustrian Perdagangan (Disperindag) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), mampu meraih nilai transaksi hingga Rp 19,9 miliar. Pelaksanaan pasar lelang kedua tahun 2014 itu diselenggarakan pada 21 April 2014 di Hotel Lombok Plaza, Lombok, NTB.

Komoditi yang mencatatkan nilai transaksi tertinggi pada pelaksanaan PLKA itu yakni komoditi jagung pipil dengan nilai Rp 16.740 miliar. Di posisi kedua yakni keranjang madu dengan meraih nilai transaksi Rp 1,7 miliar. Sedangkan di posisi ketiga adalah komoditi kelapa sebesar Rp 900 juta.

Peserta pasar lelang yang hadir dalam kegiatan itu antara lain pengusaha atau pun pedagang dari asal Pulau Jawa dan Pulau Bali, serta pengusaha asal Provinsi NTB.

Kepala Disperindag Provinsi NTB, Lalu Imam Maliki, disela-sela pembukaan pasar lelang itu mengatakan, pelaksanaan

pasar lelang di NTB sangat membantu para petani untuk bisa langsung memasarkan hasil pertaniannya kepada para pengusaha, tanpa harus melalui para calo.

"Dengan mengikuti pasar lelang ini, para petani pun bisa mendapatkan keuntungan lebih besar, karena mata rantai pasar dipotong dengan langsung berhadapan dan bertransaksi bersama para pengusaha," kata Imam.

Sebab itu, Imam Maliki, mengingatkan para petani atau pun pengusaha asal NTB untuk menanamkan serta memiliki sikap mental percaya diri. Sikap tersebut sangat penting dalam memberikan kepercayaan kepada mitra usaha.

"Sikap percaya diri oleh petani akan membangun hubungan yang harmonis dengan para pengusaha, demikian juga sebaliknya. Dan jika hubungan harmonis itu terjalin, maka bisnis pun bisa berjalan lancar dan meningkat kesejahteraan petani," ujar Imam Maliki.

Konsumsi Kakao Meningkatkan Industri Defisit Bahan Baku



Konsumsi masyarakat Indonesia terhadap produk olahan kakao sejak tahun 2013 meningkat tajam menjadi sebesar 400 gram per kapita. Sebelumnya di tahun 2010 masih berkisar 250 gram per kapita. Meski kalah jauh dengan konsumsi masyarakat Eropa yang mencapai 8 kg per kapita, industri kakao di dalam negeri pada tahun 2020 diperkirakan mengalami defisit bahan baku sekitar satu juta ton.

Menurut Wakil Menteri Perindustrian,

Alex SW Retraubun, saat penyelenggaraan Konferensi Kakao Internasional Indonesia Keenam, di Nusa Dua, Bali, 16 Mei 2014, defisit bahan baku kakao itu dikarenakan setiap tahun terjadi peningkatan permintaan sekitar 2 % hingga 4 % per tahun.

"Sebenarnya kekurangan pasokan bahan baku kakao itu justru merupakan peluang bagi Indonesia yang kini merupakan produsen kakao nomor tiga terbesar di dunia setelah Ghana dan

Pantai Gading," ujar Alex.

Sebab itu, tambah Alex, untuk meningkatkan produksi kakao maka pemerintah melalui Kementerian Pertanian melakukan gerakan nasional peningkatan produksi kakao.

Di pihak lain Menteri Perdagangan, M. Lutfi, mengatakan, untuk meningkatkan kapasitas produksi industri pengolahan kakao di dalam negeri, Kementerian Perdagangan mempertimbangkan beberapa opsi kebijakan.

"Opsi pertama, pemerintah akan menurunkan bea masuk (BM) kakao impor menjadi 0 %, sehingga industri pengolahan di dalam negeri bisa mengoptimalkan produksinya," kata Lutfi.


Opsi lain tambah Lutfi, Kementerian Perdagangan akan menaikkan bea keluar kakao, sehingga diharapkan para petani lebih memilih menjual komoditasnya ke pasar lokal dibandingkan ekspor.

PT Bukit Asam Pionir Market Maker Kontrak Batubara JFX



PT Bukit Asam Tbk (Persero) akan melakukan penjualan komoditas batubara melalui Jakarta Futures Exchange (JFX). Hal itu dilakukan guna memperbaiki harga jual batubara di dalam negeri. Direktur Utama PT Bukit Asam Tbk, Milawarma, mengatakan, PTBA akan menjadi perusahaan batubara yang pertama di Indonesia melakukan transaksi melalui bursa berjangka. "Dalam waktu dekat kami masuk perdagangan batubara masuk di JFX, dan ini yang pertama di Indonesia,"

kata Milawarma, usai menghadiri acara BUMN Marketers Club, di Kantornya, Jakarta, 19 Mei 2014. Ia menambahkan, dengan menjual komoditas batubara melalui bursa berjangka, dapat memperbaiki harga batubara apa lagi di tengah penurunan harga di pasar internasional. "Seperti pada komoditi timah, harga timah di dalam negeri berangsur-angsur membaik setelah dilakukan penjualan melalui bursa berjangka." "PTBA akan *lead* dulu, sehingga mendapatkan indeks harga batubara yang fair, sama seperti dengan bursa timah, sehingga penetapan indeks batubara akan terbentuk di bursa, buka *b to b*," tutur Milawarma.

Menurut Milawarma, untuk tahap awal penjualan batubara di bursa berjangka hanya sebatas kesepakatan dengan pembeli. Selain memperbaiki harga, penjualan batubara melalui bursa berjangka juga dapat menghindari penambangan ilegal dan pelabuhan ilegal yang dapat merugikan pengusaha. "Ini uji coba beberapa lot, kalau bisa berhasil akan diikuti pengusaha batubara lain. Melalui bursa tidak ada lagi perdagangan batubara liar, suplai pun akan terpantau dan pemerintah pun bisa mengatur tata niaga supaya tidak ada lagi ilegal mining dan ilegal port," jabar Milawarma. 

BI Gagas Pilot Proyek SRG di Sragen

Bank Indonesia, Cabang Solo, Jateng, terus berupaya menggiatkan sistem resi gudang (SRG) di tingkat petani. Keseriusan bank sentral ditunjukkan dengan menggarap *pilot project* di Kabupaten Sragen.


Kepala Kantor Perwakilan Bank Indonesia, Solo, Ismet Inono, mengatakan, saat ini bank sentral terus mendorong agar petani masuk dalam skema SRG. Salah satunya dengan melakukan pendekatan kelompok tani. "Kami akan menggerakkan ini dalam kelompok tani. Pasalnya, dengan kelompok tani akan

jauh lebih termotivasi dari pada secara individual," ujar Ismet kepada media, 5 Mei 2014, di Sragen.

Menurut Ismet, praktik SRG sebenarnya sudah ada di Kabupaten Sragen. Hanya saja belum berjalan seperti dikehendaki. Salah satu kendalanya, lantaran keengganan petani pada biaya dan di sisi lain produk yang masuk ke gudang harus memenuhi standar SNI.

"Sebab itu, sebagai bagian dari *pilot project*, saat ini BI Solo membuat demonstrasi plot (Demplot) dengan penanaman benih muda. Pola

pengelolaannya pun dilakukan dengan menerapkan manajemen pertanian yang lebih baik," kata Ismet.

Bukan itu saja, tambahnya, pihak bank sentral juga melakukan pemantauan dalam beberapa hal. Termasuk mendampingi petani hingga menghasilkan panen seperti yang diharapkan. "Kami akan memantau perkembangan dan produktivitas demplot yang sudah ada. Jika proyek ini berhasil, maka akan diarahkan ke SRG pada tahun 2015," papar Ismet Inono. 



Harga dan Ekspor CPO Tergelincir

Prediksi ekspor crude palm oil (CPO) dan turunannya asal Indonesia yang diperkirakan meningkat jelang Ramadhan ternyata meleset. Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) dalam rilis tertulisnya, di Jakarta, 16 Mei lalu, mengatakan, situasi ekonomi dan terbitnya beberapa kebijakan penggunaan minyak nabati di negara tujuan ekspor telah menggerus ekspor CPO dan turunannya asal Indonesia.

"Spekulasi El Nino ternyata tidak cukup kuat untuk mengerek ekspor. Volume ekspor CPO dan turunannya asal Indonesia untuk April 2014 tercatat menurun sebesar 23% dari 1,79 juta ton Maret lalu menjadi 1,38 juta ton di bulan April," kata Gapki.

Hampir semua negara tujuan utama ekspor CPO dan turunannya asal Indonesia membukukan penurunan yang cukup signifikan kecuali Amerika Serikat (AS). China mengurangi pembelian CPO dan turunannya lebih 144 ribu ton (51%) dibandingkan dengan bulan sebelumnya dari 281 ribu ton menjadi 137 ribu ton.

Penurunan permintaan dari Tiongkok dipengaruhi pertumbuhan ekonomi yang melambat, dan juga tercatat



mengurangi pembelian minyak nabati lainnya seperti pembatalan sejumlah kontrak pembelian kedelai asal Amerika Serikat.

Volume ekspor CPO ke India juga tercatat turun 14 % dari 412 ribu ton Maret lalu menjadi 353 ribu ton pada bulan April. Penurunan permintaan India juga disebabkan inflasi meningkat dan nilai tukar rupee yang melemah. Selain itu, untuk menjaga industri minyak nabati di dalam negerinya India telah menotifikasi WTO untuk

menyelidiki impor saturated fatty alcohol yang diklaim telah membuat industri refinery India cedera berat.

Keadaan yang cukup mengejutkan di Pakistan. Negara yang mayoritas berpenduduk muslim ini ternyata menurunkan permintaannya meskipun Ramadhan sudah dekat. Volume ekspor CPO dan turunannya ke Pakistan tercatat menurun 29% dibandingkan dengan bulan lalu yaitu dari 174 ribu ton menjadi 123 ribu ton. Penurunan permintaan dari Pakistan disebabkan adanya kebijakan larangan impor minyak goreng dan fatty acid dalam kemasan drum dan pembatasan impor dalam skala besar oleh industri pengguna (seperti industri sabun dan oleo-chemical) sebagai akibat adanya indikasi impor CPO ilegal.

Harga Karet Diramal Jeblok Hingga 2016



The Rubber Economist Ltd memprediksi, harga karet masih akan tertekan hingga tahun 2016. Penyebabnya, hingga kini pasokan karet global masih surplus sedangkan produksi karet melonjak dan permintaan karet dari

Tiongkok sebagai konsumen karet terbesar di dunia, masih melemah.

Prachaya Jumpasut, Managing Director The Rubber Economist Ltd, bilang, surplus karet pada tahun 2016 diperkirakan mencapai 316 ribu ton, naik jika dibandingkan pada tahun 2015 yang mencapai surplus 483 ribu ton.

"Pasar karet alam dapat tetap surplus sampai tahun 2016," kata Prachaya Jumpasut, belum lama ini. "Harga mungkin tetap bearish sampai saat itu, kecuali stok karet terbantu oleh tingginya permintaan dari China dan negara-negara konsumen utama lainnya," tambahnya.

The Rubber Economist Ltd juga meningkatkan perkiraan surplus untuk

tahun ini, karena produksi di Thailand, produsen dan eksportir terbesar, melampaui prediksi sebelumnya. Hal senada juga diungkapkan International Rubber Study Group (IRSG) yang juga menaikkan prospek surplus karet. Menurut IRSG, produksi akan meningkat karena pohon yang ditanam antara tahun 2006 dan 2008 lebih matang.

Di sisi lain, harga karet berjangka di Tokyo Commodity Exchange (Tocom) telah jatuh 25 % tahun ini dan menyentuh level terendah empat tahun di bulan April. Harga yang lebih rendah dapat merugikan petani kecil yang menyuplai sekitar 80% dari pasokan dunia.



Indonesia lost US\$130.754 million of tin export royalty within 9 years

Indonesian Corruption Watch (ICW) recorded allegation of state losses about US\$ 231,9 million or about 4.171 trillion from illegal tin export activity during the period of 2004 - 2013. The state losses came from illegal tin export that reached around 301.800 tons with the selling value of US\$ 4.368 billion or around IDR 50.121 trillion (rate exchange at IDR 11.500).

The coordinator of ICW Budget Analysis and Monitoring Division, Firdaus Ilyas on his statement to the press on 2nd of May 2014 revealed the allegation of

state losses from the obligation of royalty payment and corporate income tax.

"Thus during 9 years period, this state is potentially losing 3% of royalty payment from tin selling rate US\$ 130.754 million. On the other hand from the responsibility of corporate income tax payment, this country is potentially losing US\$ 231.998 which is equal with IDR 2.667 trillion from illegal tin export income tax."

The value of corporate income tax during the period of 2004 - 2013 base on the assumption of average earnings

20% before tin smelter tax. With the breakdown of applicable tax charge between 2004 - 2008 which is 30%, 28% in 2009 and 25% between 2010 - 2013.

As stated by Firdaus Ilyas, the potency of losing royalties and corporate income tax on state income was known after ICW done reasearch on custom official data of 22 tin importer countries. Those official data from tin exportir countries custom then compared with export official data that was recorded at Trading Ministry and Statistic Central Bureau.

Coffee contract JFX new trend

Trading transaction valome of primary commodity at JFX has significant growth after the launcing of coffee futures contract on last December 2013.

JFX's director, Bihar Sakti Wibowo, said that currently the coffee futures contract became the new trend at JFX. It means that market participants gave positive respond towards coffee futures contract and the bureau became the tool of price formation.

"JFX's data on first semester in 2014 recorded 89.125 lot for the futures contract of primary commodity or 45% increase from 61.336 lot of the same period last year," Bihar stated recently.

Bihar said that at the first semester in 2014 the total volume of Arabican contract transaction reached 15.698 lot and Robusta contracts reached 22.668 lot. The value per point of Arabican coffee contract is IDR 50 per kg in March, May, July September and December contract. While for Robusta coffee, the contract unit is 5 tons (5000 kgs) with SNI Grade VI-B of Robusta Coffee quality (No. 01-2907-2008) as per National Standarization Bureau policy. The value per point for Robusta Coffee contract is IDR 10 per kg in January, March, May, July, September and November contracts.

Lifting the Multilateral, JFX launched JAFETS Colt

JFX in order to increase the multilateral trading online service has launched new trading system that was known as JAFets Colt (Jakarta Futures Elektronik Trading System – Client Online Trading)

JFX director, Bihar Sakti Wibowo said that JAFets Colt launching is one of JFX efforts to give service to member in order to increase multilateral transaction. "The feature that was launched has a friendly usage view. For sure this platform has went through severa; trial and error process with an excellent result."

"With this new trading system – JAFetS Colt, the market participants transactions are significantly increased. As per first semester in 2014, the multilateral transaction in JFX was recorded as 89.152 lots or 45.35% increase from 61.336 lot on the same period last year. With this transaction volume increase, the multilateral contract has gave 11% contribution from total of 815.000 lost at first semester in 2014," Bihar stated.

With JAFetS Colt's presence, JFX hopes that multilateral transaction of the market participants will grow and reach the target as market price formation tools. "We also hope that in the future JFX will become the world reference of commodity price which we are sure it will be achieved in near future," Bihar Sakti Wibowo emphasized.



PENERBITAN RESI GUDANG BULAN APRIL 2014

		Penerbitan				
NO.	Pengelola Gudang/Gudang	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Jumlah Komoditi (Ton)	Harga (Rp/Kg)	Nilai Barang (Rp)
1.	PT. PERTANI					
	- Indramayu (Haurgeulis)	Gabah	39	1040	6.010	6.250.000.000
	- Sidrap	Gabah	2	341	4.500	1.535.625.000
	- Probolinggo (Krasan) *	Gabah	3	565	4.400	2.486.000.000
		Beras	1	75	6.800	510.000.000
	- Tuban *	Gabah	6	45	5.200	236.080.000
	- Indramayu (Tukdana)	Gabah	41	1406	5.624	7.906.067.500
	- Bojonegoro *	Gabah	1	46	4.800	222.240.000
	- Bantul *	Jagung	1	20	3.000	60.000.000
	- Pinrang	Gabah	2	307	4.500	1.382.062.500
2.	KOPERASI NIAGA MUKTI					
	- Cianjur *	Gabah	28	11	460.021	4.959.945.000
Jumlah		Gabah	122	3762	61.882	24.978.020.000
		Jagung	1	20	3.000	60.000.000
		Beras	1	75	6.800	510.000.000
Total			124	3.857		25.548.020.000

Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI

PEMBIAYAAN RESI GUDANG BULAN APRIL 2014

		Penerbitan			Pembiayaan		
NO.	Pengelola Gudang/Gudang	Komoditi	Jumlah Resi Gudang	Nilai Barang (Rp)	Jumlah Resi Gudang	Nilai (Rp)	Bank/LKBN
1.	PT. PERTANI						
	- Indramayu (Haurgeulis)	Gabah	39	6.250.000.000	-	-	6.250.000.000
	- Sidrap	Gabah	2	1.535.625.000	2	1.074.000.000	1.535.625.000
	- Probolinggo (Krasan) *	Gabah	3	2.486.000.000	3	1.325.000.000	2.486.000.000
		Beras	1	510.000.000	1	300.000.000	510.000.000
	- Tuban *	Gabah	6	236.080.000	2	59.500.000	236.080.000
	- Indramayu (Tukdana)	Gabah	41	7.906.067.500	4	272.300.000	7.906.067.500
	- Bojonegoro *	Gabah	1	222.240.000	-	-	222.240.000
	- Bantul *	Jagung	1	60.000.000	-	-	60.000.000
	- Pinrang	Gabah	2	1.382.062.500	-	-	1.382.062.500
2.	KOPERASI NIAGA MUKTI						
	- Cianjur *	Gabah	28	4.959.945.000	28	3.466.650.000	4.959.945.000
Jumlah		Gabah	122	24.978.020.000	39	6.197.450.000	24.978.020.000
		Jagung	1	60.000.000	0	-	60.000.000
		Beras	1	510.000.000	1	300.000.000	510.000.000
Total			124	25.548.020.000	40	6.497.450.000	25.548.020.000

Sumber : BIRO PASAR FISIK DAN JASA, BAPPEBTI



NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG BULAN APRIL 2014

NO.	Wilayah	Nilai Transaksi Periode April 2014 (Rp.)	Nilai Transaksi Periode April 2013 (Rp.)	Nilai Transaksi Jan-April 2014 (Rp.)
1.	Sumatra Barat	847.660.000	1.419.120.000	5.625.822.500
2.	Jambi	3.692.809.000	5.308.880.000	3.692.809.000
3.	Lampung	162.800.000		162.800.000
4.	Jawa Barat	Nihil	9.331.750.000	22.066.625.000
5.	Jawa tengah	17.748.000.000	10.530.000.000	58.199.440.000
6.	Yogyakarta	13.515.800.000	16.476.100.000	41.186.300.000
7.	Jawa timur	11.988.000.000	25.400.000.000	85.354.400.000
8.	Bali	Nihil	3.681.500.000	0
9.	NTB	19.903.400.000	1.236.400.000	23.663.600.000
10.	Sulawesi Utara	2.300.000.000	9.475.200.000	10.556.300.000
11.	Sulawesi Selatan	Nihil	574.600.000	2.257.000.000
12.	Sulawesi Tenggara	Nihil	Nihil	5.609.800.000
13.	Gorontalo	Nihil	Nihil	0
14.	PT iPasar Indonesia	65.000.000	603.358.000	65.000.000
15.	Pasar Fisik CPO	Nihil	Nihil	0
TOTAL		72.223.469.000	84.433.550.000	260.739.896.500

PENYELENGGARAAN DAN NILAI TRANSAKSI PASAR LELANG SPOT PERIODE APRIL 2014

Komoditas	Penawaran Maret 2014	Transaksi Januari - Maret 2014	
	Kuantitas	Kuantitas	Nilai (Rp)
Jati	0	0	0
Mahoni	0	0	0
Jagung	940.000 Kg	20.000 Kg	65.000.000
Rumput Laut	0	0	0
Kopi	140.000 Kg	0	0
Gondorukem	1.182 Ton	0	0
TOTAL NILAI TRANSAKSI			65.000.000

Subjek Kontrak Berjangka

Pengantar Redaksi

Undang-undang No. 10 Tahun 2011, tentang Perdagangan Berjangka Komoditi yang menyempurnakan Undang-undang No. 32 Tahun 1997, antara lain mengubah definisi komoditi sebagai subjek perdagangan berjangka. Dengan adanya perubahan itu, maka subjek kontrak berjangka yang diperdagangkan oleh Bursa Berjangka bisa dalam bentuk *tangible* atau pun *intangible*.

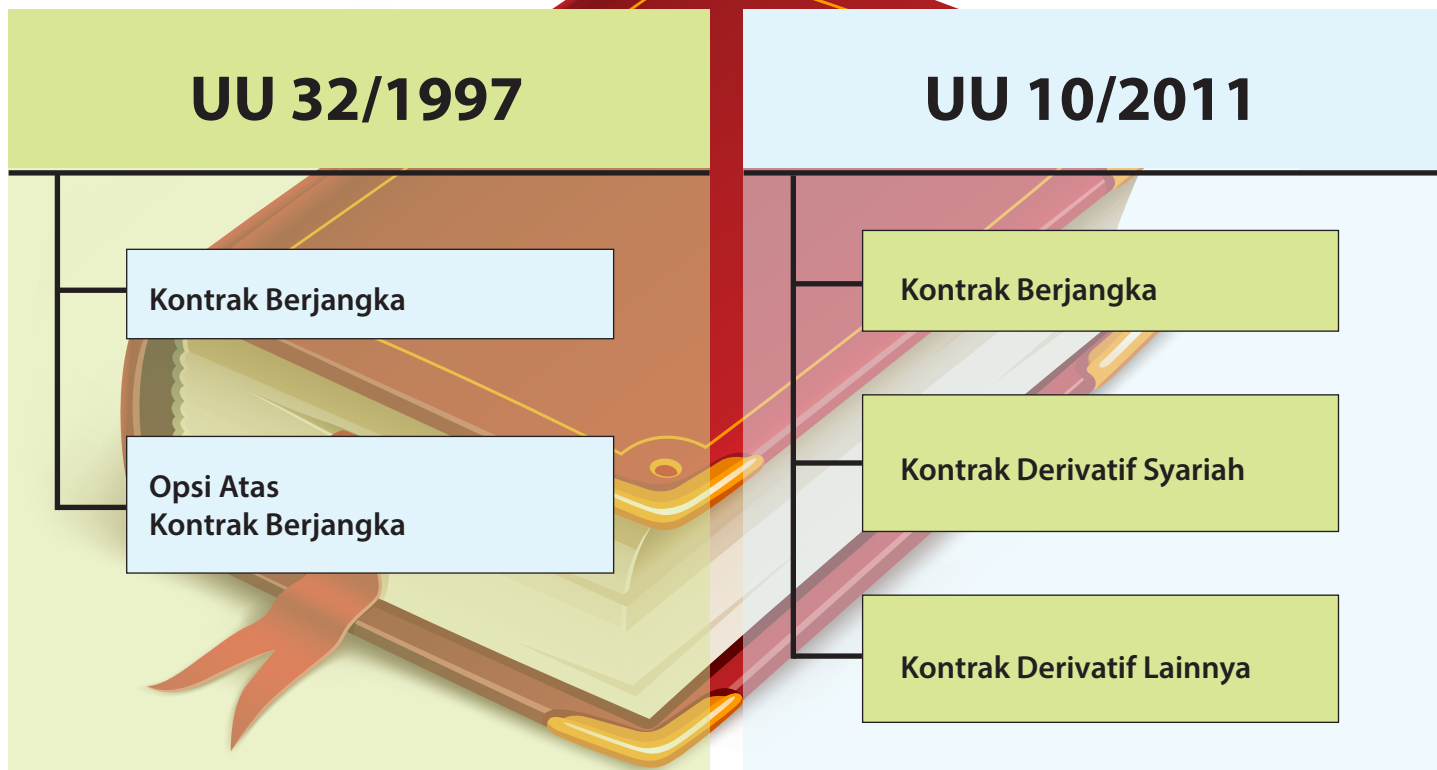
Di sisi lain dari perubahan definisi komoditi sebagai subjek kontrak berjangka berdampak pada penambahan jenis kontrak berjangka seperti kontrak derivatif syariah dan kontrak derivatif lainnya. yang dimaksud dengan kontrak derivatif lainnya seperti kontrak berjangka yang diperdagangkan di luar bursa. Di

kalangan industri perdagangan berjangka internasional, kontrak berjangka di luar bursa menawarkan seperti kontrak indeks, forex, option, suku bunga dan lainnya.

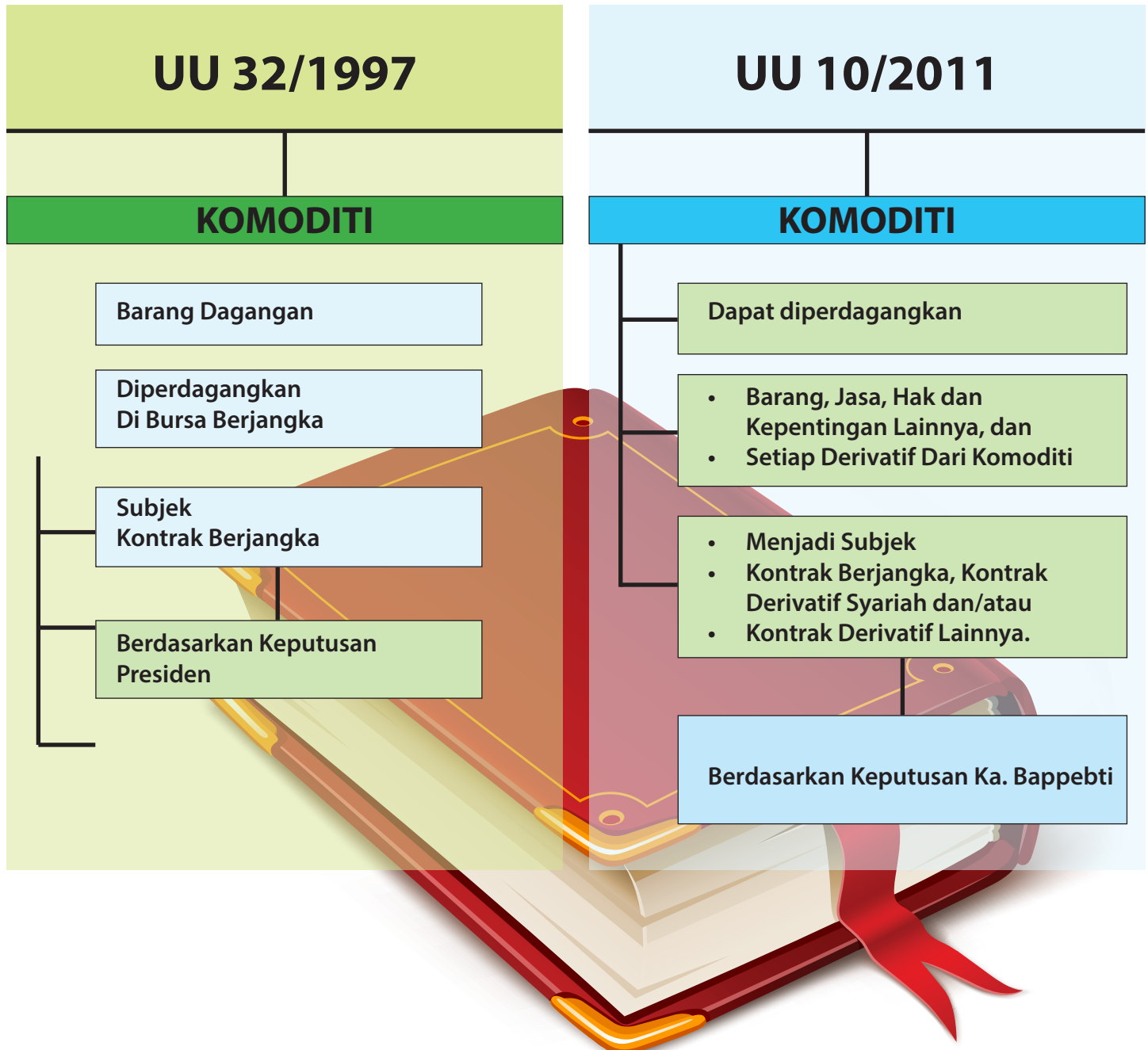
Sementara itu, penyempurnaan payung hukum perdagangan berjangka komoditi juga memangkas kewenangan institusi yang mengeluarkan izin kontrak berjangka komoditi. Jika semula sebuah subjek kontrak berjangka ditetapkan melalui Keputusan Presiden, maka menurut Undang-undang No. 10 Tahun 2011, cukup ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Bappebti.

Berikut ini pengembangan undang-undang perdagangan berjangka berdasarkan UU No.10 Tahun 2011;

KONTRAK YANG DIPERDAGANGKAN



KOMODITI YANG DAPAT DIJADIKAN SUBJEK PERDAGANGAN BERJANGKA





Part II Produk Derivatif yang Diperdagangkan di Bursa

Seperti telah diuraikan dalam tulisan sebelumnya **"Produk Keuangan Berbasis Valuta Asing: Fisik Dan Derivatif"** ada beberapa produk derivatif yang diperdagangkan secara bilateral maupun secara multilateral. Perdagangan secara multilateral dikenal sebagai perdagangan di bursa. Produk derivatif pada prinsipnya adalah produk yang di dalamnya memuat perjanjian untuk melakukan pertukaran terhadap suatu komoditi pada waktu yang diperjanjikan di masa mendatang, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, di mana nilai dari komoditi tersebut diturunkan atau mengacu kepada perdagangan produk tersebut di pasar fisik (*underlying market*) yang sudah disepakati. Di samping faktor 'nilai/harga' produk, perdagangan derivatif dibedakan juga dari segi penyerahan barang sebagai konsekuensi dari kegiatan jual beli tersebut. Karakteristik yang menonjol dari perdagangan derivatif adalah tidak diwajibkan untuk melakukan serah terima fisik.

Perdagangan derivatif yang memiliki risiko lebih besar dibandingkan perdagangan fisik pada umumnya akan lebih terjamin jika dilakukan di bursa. Meskipun demikian hal ini tidak

mengurangi minat para pelaku pasar untuk memperdagangkan produk derivatif tersebut di luar bursa. Kontrak derivatif yang diperdagangkan di luar bursa umumnya merupakan kontrak gulir atau yang disebut juga *Contract for Differences* (CFD). CFD merupakan produk turunan dari produk yang diperdagangkan di pasar fisik, baik itu perdagangan komoditi (kopi, emas, jagung), perdagangan saham, perdagangan valas, maupun perdagangan produk keuangan lainnya seperti tingkat suku bunga bank maupun indeks saham. Di Indonesia perdagangan produk CFD masih mencakup produk komoditi, valas, dan indeks saham dimana produk-produk tersebut masih menggunakan *underlying market* yang berasal dari pasar di luar negeri.

Mengapa kontrak gulir (CFD) tidak lazim diperdagangkan di bursa?

Ada beberapa karakteristik CFD yang mengakibatkan jenis kontrak ini tidak lazim diperdagangkan di bursa. Hal ini dikarenakan fungsi bursa antara lain sebagai sarana pembentukan harga, baik itu bursa saham maupun bursa derivatif. Perdagangan CFD tidak menghasilkan pembentukan harga, karena menggunakan harga yang

mengacu kepada harga dari pasar yang telah ditentukan sebelumnya sebagai referensi (*price adoption*). Hal ini dapat terjadi karena hanya terdapat 1 (satu) orang pedagang yang bertransaksi melawan nasabah. Dengan demikian pembentukan harga tidak dimungkinkan terjadi karena adanya penguasaan pasar yang tidak seimbang dengan adanya posisi dominan yang menguasai pasar, dalam hal ini penyelenggara sistem perdagangan CFD.

Berbeda halnya dengan perdagangan di bursa yang antara lain bertujuan untuk membentuk harga (*price discovery*), baik harga pada masa kini maupun masa yang akan datang. Pembentukan harga dimungkinkan terjadi di bursa berjangka, karena di bursa tersebut terdapat banyak pembeli dan penjual yang bebas bertransaksi dengan pihak mana saja sehingga tercipta harga pasar yang wajar sesuai mekanisme *supply demand*. Harga yang terbentuk di bursa derivatif adalah harga yang dapat dieksekusi di masa kini dan masa yang akan datang apabila kontrak tersebut berakhir sesuai jadwal dari masing-masing bulan kontrak (*contract month*) yang disepakati. Hal ini sedikit berbeda dengan pasar saham, perdagangan saham menghasilkan harga



yang dapat dieksekusi hanya pada saat itu (*current price*).

Selain fungsi sebagai sarana pembentukan harga, bursa yang sebenarnya berfungsi sebagai pasar juga berperan untuk melakukan pertukaran (*physical exchange*). Pertukaran barang atau serah terima fisik hanya dimungkinkan jika para pihak sepakat dengan harga yang terbentuk di bursa tersebut. Perdagangan kontrak derivatif umumnya selalu memiliki *spread* antara harga jual dan beli, baik untuk kontrak berjangka maupun kontrak gulir (CFD). Besaran *spread* tersebut menggambarkan efisiensi dari bursa. Semakin besar *spread* antara harga jual dan harga beli, maka semakin tidak efisien pasar tersebut. Hal ini mengakibatkan perdagangan kurang likuid, dimana nasabah sulit mengurangi ekspektasi keuntungan yang diharapkan.

Besarnya *spread* tersebut dapat diatasi dengan mekanisme yang ada dalam perdagangan kontrak berjangka. *Spread* pada kontrak berjangka umumnya tidak sebesar *spread* pada CFD. Bahkan untuk perdagangan pada bulan terakhir, *spread* tersebut mendekati nol karena pada hari perdagangan terakhir untuk setiap bulan kontrak dilakukan penentuan *settlement price*. Penentuan *settlement*

price tersebut dilakukan oleh komite yang ada di bursa melalui mekanisme yang diatur dalam *trading rules* bursa. Harga tersebut diharapkan menjadi harga yang adil dan wajar bagi semua pihak yang bertransaksi (*single price*). Penentuan *settlement price* ini memungkinkan para pihak untuk melakukan serah terima setelah perdagangan kontrak bulan tersebut berakhir dengan lebih *fair* tanpa harus memperhitungkan faktor selisih harga. Jika kontrak tidak ditutup pada hari perdagangan terakhir, akan diikuti dengan kewajiban serah fisik. Kewajiban serah terima fisik ini mau tidak mau meng-*counter* adanya aksi spekulasi, karena nasabah pada akhirnya dikenakan kewajiban serah fisik dengan menggunakan harga yang berlaku di pasar. Serah terima fisik ini dapat menjadi salah satu alat kontrol agar pembentukan harga benar-benar sesuai dengan harga pada *underlying market*.

Sedangkan untuk kontrak gulir, tidak ada mekanisme hari perdagangan terakhir yang mewajibkan semua kontrak harus ditutup. Hal ini mengakibatkan tidak ada *settlement price*, yang lazim digunakan adalah *closing price* yang biasanya merupakan rata-rata *best bid* dan *best offer* pada setiap akhir hari perdagangan. Fungsi *closing price* berbeda dengan fungsi *settlement price*. *Closing price* pada kontrak gulir lebih ditujukan untuk menghitung nilai masing-masing posisi terbuka pada setiap akhir hari perdagangan, antara lain untuk perhitungan kecukupan margin dan biaya gulir (*overnite charge*). Dengan demikian kontrak gulir ini tidak mengenal serah terima fisik dan kurang memenuhi fungsi bursa sebagai sarana pertukaran barang. Oleh karena itu para pelaku dapat lebih mudah memperdagangkan kontrak gulir di luar bursa jika sudah mendapat kepercayaan dari nasabah. Kondisi ini berbeda dengan kontrak berjangka yang membutuhkan beberapa instrumen yang membutuhkan pengawasan dari berbagai pihak sehingga perlu diperdagangkan di bursa. Pengawasan ini sangat penting

untuk mendukung tercapainya fungsi bursa sebagai sarana pembentukan harga yang dapat dipercaya dan sarana pertukaran barang/jasa yang efisien.

Perbedaan inilah yang mengakibatkan perbedaan sistem perdagangan kedua kontrak derivatif ini. CFD kurang cocok untuk diperdagangkan di bursa derivatif karena tidak sejalan dengan fungsi bursa. Perbedaan sistem perdagangan ini membutuhkan perbedaan sistem pengawasan dan monitoring kepada para pelaku yang terkait. Hal ini dikarenakan perbedaan tersebut menciptakan risiko yang berbeda dan jenis *fraud* yang berbeda pula. Disamping itu perdagangan di bursa yang bersifat multilateral menggunakan sistem perdagangan dari pihak independen diluar para pelaku yang bertransaksi sangat berbeda dengan karakteristik perdagangan bilateral yang menggunakan sistem perdagangan yang disediakan oleh salah satu pihak yang bertransaksi.

Perdagangan kontrak berjangka valas di Indonesia, maupun produk keuangan lainnya sampai saat ini belum dilakukan di bursa, karena adanya kendala peraturan di bidang keuangan, moneter, dan kurangnya dukungan infrastruktur. Sedangkan perdagangan CFD valas maupun produk keuangan lainnya saat ini masih dilakukan secara bilateral dan mendapat pengawasan oleh Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPEBTI). Perdagangan kontrak derivatif yang dikenal dengan Sistem Perdagangan Alternatif merupakan transaksi yang dilakukan di luar bursa dengan menggunakan sistem perdagangan dari masing-masing penyelenggara. Transaksi CFD yang sudah '*match*' tersebut kemudian dilaporkan ke bursa berjangka untuk selanjutnya diregistrasi ke lembaga kliring yang sudah ditunjuk. Hal ini berbeda dengan yang dilakukan di Amerika Serikat sebagaimana diuraikan di atas, di mana pelaporan transaksi tidak dilakukan oleh penyelenggara sistem perdagangan ke bursa berjangka. ❧ *) **Nurlisa Arfani** (Calon Widyaiswara, Pusdiklat Kamendag)



Sektor pendidikan harus mendukung dan menghasilkan SDM handal di bidang perdagangan berjangka komoditi, jika ingin industri ini bergerak maju dan sejajar dengan negara lain.

Ofik Taufiqurrahman

Industri PBK Harus Didukung Sektor Pendidikan

Potret industri perdagangan berjangka komoditi (PBK) di Indonesia masih tampak redup. Dari kacamata Direktur Utama, PT Mentari Mulia Berjangka (MMB), Ofik Taufiqurrahman, hal itu dapat dilihat dari pencapaian transaksi kontrak komoditi multilateral yang belum memenuhi harapan dan amanat UU Perdagangan Berjangka Komoditi (PBK).

"Memang bukan perkara mudah untuk meningkatkan transaksi multilateral. Semua itu butuh proses. Dan, saya sangat mengapresiasi langkah otoritas (Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi) yang mewajibkan pelaku usaha meningkatkan transaksi multilateral minimal 5 %," kata Ofik Taufiqurrahman, yang akrab disapa Ofik, di ruang kerjanya, Gedung WTC 1 Lt.7, Jln. Jend. Sudirman Kav.29, Jakarta, Mei 2014 lalu.

Bercermin dari hal tersebut, Alumni Fakultas Manajemen Pendidikan, IKIP

Jakarta tahun 1991 ini, menilai, materi futures trading (PBK) harusnya dapat masuk ke dalam pendidikan formal agar industri ini dapat berkembang. "Kalau industri ini ingin maju, harusnya ada perguruan tinggi dengan jurusan futures trading," katanya.

Dengan adanya fakultas futures trading di sebuah perguruan tinggi, Ofik optimis, industri PBK bakal memiliki SDM handal dan profesional. Dengan itu, instrumen PBK akan dapat dikenal dan dipahami masyarakat. "Alhasil industri PBK dapat berkembang dan maju sesuai amanat UU PBK," ujarnya.

Selain itu, Ofik juga menyarankan kepada pelaku usaha agar kembali me-refresh pemahamannya tentang UU Nomor 10 Tahun 2011 tentang PBK. "Industri ini akan maju, jika para pelaku usaha memahami tujuan UU PBK." Dan tak kalah penting, Ofik berharap, asosiasi industri perdagangan berjangka yang saat

ini masih dalam proses pendirian, sangat berperan dalam membuat perencanaan untuk memajukan industri PBK.

"Asosiasi harus tampil membangun sinergitas kepada semua pihak terkait. Seperti melakukan loby kepada DPR, KADIN, OJK dan lembaga lainnya. Jadi peran asosiasi itu penting 'loh,' ucapnya.

Mantan Dosen

Penilaian Ofik terhadap pentingnya fakultas futures trading di sebuah perguruan tinggi tak lepas dari background-nya sebagai tenaga pendidik di sebuah perguruan tinggi. Ayah dari **Taufar Adhi Pradana Kusumah** dan **Elsa Kusumah**, ini, ternyata sempat menjadi dosen di IAIN Syarif Hidayatullah (sekarang Universitas Islam Negeri [UIN] Jakarta) pada tahun 1992-1999. "Waktu itu saya mengajar ilmu alamiah dasar," kenang Ofik.

Tapi, sekitar tahun 2000, Ofik banting

stir dari tenaga pengajar menjadi pelaku usaha di industri PBK. Meski demikian, latar belakang Ofik sebagai tenaga pengajar masih terbawa hingga saat ini. "Mesti tidak menjadi pengajar lagi, saya masih suka memberikan training tentang PBK," katanya.

Adapun karirnya di industri PBK, diawali sebagai wakil pialang, marketing, dan sebagai trainer di sebuah perusahaan pialang. "Saya merangkap tiga posisi sekaligus, karena memang saat itu SDM di industri kita sangat minim," terangnya.

"Saya juga mengikuti ujian profesi wakil pialang yang pertama kali diadakan oleh Bappebti, kurang lebih saat itu ada 500 orang yang ikut," sambung Ofik.

Kepercayaan yang diberikan kepada Ofik untuk merangkap tiga posisi itu bukanlah tanpa dasar. Rupanya, pria kelahiran Kuningan, Jabar, 9 April 1965, ini, telah lebih dahulu mengenal dan memahami perdagangan berjangka komoditi. "Sebenarnya, di tahun 1990 sampai 1992 saya sudah bergabung di sebuah *commision house*. Di sana saya mengenal perdagangan berjangka komoditi. Tapi sayangnya, waktu itu belum ada UU yang mengatur perdagangan ini. Sisi positifnya, saya banyak mendapatkan bekal ilmu yang bisa diterapkan di industri ini," jelasnya.

Beberapa tahun kemudian, karir suami dari **Farida Sulistiati**, ini, terus menanjak. Ia mulai menempati posisi penting dalam bagian top manajemen. Dari catatan karirnya, Ofik juga sempat berpindah ke beberapa perusahaan pialang dengan menempati kursi direksi. Dan terhitung sejak awal 2013 lalu, Ofik resmi bergabung dan menduduki posisi Dirut PT MMB hingga sekarang.

"Di tahun 2009, saya juga sempat vakum sebentar dari pekerjaan, karena ada masalah keluarga," ungkapny.

Top Ten

Di bawah komando Ofik, MMB yang mendapatkan izin operasional pada Maret 2013 lalu, mulai berkembang. Dia bilang, MMB merupakan member Jakarta Futures Exchange (JFX) yang aktif melakukan transaksi multilateral untuk komoditi emas. "Kontribusi MMB untuk kontrak berjangka emas sekarang sudah mencapai 500 lot per bulan. Nasabah kami banyak yang tertarik dengan kontrak berjangka emas satuan 100 gr (GOL100)," terangnya.

Bagaimana dengan produk di BKDI? Ofik mengatakan, hingga saat ini PT MMB belum menjadi member dari BKDI dan baru menjadi member JFX.

Sementara itu, untuk sistem perdagangan alternatif (SPA) atau kontrak bilateral, MMB sudah mendapatkan izin untuk memperdagangkan *mini Account* (kontrak mini). "Sudah ada 10.000 account untuk kontrak mininya," katanya.

Hebatnya lagi, kata pria yang memiliki hobi menyanyi dan bermain musik ini, MMB yang masih terhitung baru sebagai



perusahaan pialang, sudah bisa menempati urutan ke- 22 sebagai pialang teraktif di Indonesia. "Target kami tahun 2015 mendatang, MMB menjadi perusahaan pialang terdepan yang masuk daftar 5 besar pialang teraktif di Indonesia," kata Ofik optimis.

Untuk mencapai itu, Ofik mengatakan, MMB akan meningkatkan sosialisasi perdagangan berjangka komoditi kepada masyarakat. Saat ini, pihaknya juga aktif melakukan sosialisasi kepada mahasiswa-mahasiswa di beberapa kampus. "Belum lama kami juga telah mengadakan sosialisasi di President University yang terletak di Kawasan Industri Jababeka."

Meski demikian, Ofik juga menyadari, MMB masih kekurangan SDM yang handal untuk dapat bersaing. Karena itu, saat ini Ofik fokus untuk membenahi SDM yang ada di perusahaannya.

Sementara dari sisi pribadi, Ofik bilang, suatu saat dirinya akan meninggalkan industri PBK dan akan kembali ke dunia pendidikan. Dia tertarik untuk mendirikan yayasan pendidikan ataupun sekolah untuk mengabdikan kepada masyarakat luas. Meski demikian, Ofik tak menampik jika dirinya masih sangat mencintai industri PBK. Karena itu, jika nantinya ada lembaga pendidikan futures trading, dirinya siap menjadi tenaga pengajarnya.

"Dengan bekal pengalaman sebagai tenaga pendidik dan sebagai pelaku usaha di industri PBK, saya siap untuk mengajar materi futures trading," tegas Ofik Taufiqurrahman. ☺

PASAR LELANG KOMODITI AGRO

Akses pasar dan informasi harga

Pembentukan harga transparan dan fair

Mutu dan pasokan terjamin

